BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia ialah dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum atau Pemilu. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiayang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berpedoman padaa zaman diri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga

untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Jawa Tengah selaku lembaga yang diberi kewenangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab, hak dan kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan bertugas merencanakan, melaksanakan, menetapkan dan mengkoordinasikan segala kegiatan pemilihan umum baik di tingkat kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam Tugas dan Wewenang KPU Provinsi menurut Undang – Undang RI nomor 12 Tahun 2003 pasal 25. Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah menyusun konsep strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jateng dari masa ke masa periode nya jika dilihat dari penyebab ketidakhadiran masyarakat Jawa Tengah dalam memberikan suaranya ke TPS dikarenakan alasan ekonomi, ketidakpercayaan kepada partai politik dan sengaja tidak hadir karena merasa tidak berkepentingan langsung dengan Pilkada ataupun siapa pasangan calon serta alasan bekerja (boro) terutama di luar wilayah kabupaten (bekerja) “boro” dalam jangka waktu yang lama; lebih dari tiga bulan tidak pulang ke rumah.

Masalah tersebut membuat masyarakat Jawa Tengah banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemilihan berlangsung, sehingga partisipasi pilgub pada tiap tahun nya menurun. Makin rendah tingkat pastisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat kurang

menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Padahal syarat utama penyelenggaraan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi yang bisa dilakukan dalam rangkaian tahapan pemilu dari awal hingga akhir.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2008 sampai 2013 menurun (lihat tabel).

TABEL 1.1 Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub 2008 dan 2013 di Jateng

NO	**Tahun**	**Daftar Pemilih Tetap(DPT)**	**Pemilih Yang Menggunakan hak pilih**		**Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih**	
			Jumlah	**%**	**Jumlah**	**%**
1.	2008	25.861.234	14.007.042	54.2%	11.854.192	45.8%
2.	2013	27.385.985	15.261.268	51.1%	12.124.717	49%

Sumber : KPU JATENG. Minggu, 26 Mei 2013

Direktur Riset LSI, Eka Kusmayadi, di Semarang, mengatakan jumlah ketidakhadiran pemilih pada Pilgub Jateng termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kehadiran pemilih pada Pilgub di provinsi lain yang rata – rata 30 – 36 persen. Penyebab tingginya jumlah ketidakhadiran pemilih sebagian besar beralasan sedang bekerja diluar wilayah kota (merantau atau boro) sehingga memilih tidak pulang untuk mempergunakan hak pilihnya dan lebih

mengutamakan pekerjaannya daripada datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hadi, seorang sopir taksi asal Kabupaten Banjarnegara yang merantau ke Jakarta, mengakui memiliki hak pilih dalam Pilgub Jateng 2013, tetapi ia tidak pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya. ”Tak ada biaya. Juga tak ada calon yang mau membiayai pulang,” katanya, beralasan. Istri dan anaknya justru menyusul ke Jakarta, berlibur.

(http://nasional.kompas.com/read/2008/06/25/01073942/popularitas.dalam.kejenuhan.pemilih. 14/07/2017 14:13WIB).

Bahkan pada saat pilkada, berdasarkan catatan KPU Jawa Tengah sejak pilkada digelar kurun tahun 2005-2008, 2010-2013 dan 2015-2018 tingkat partisipasi pemilih rata – rata di 21 kabupaten/kota juga menurun. Berikut presentase tingkat partisipasi pemilih pilkada (lihat tabel).

TABEL 2.1 Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak Walikota/Bupati di Jateng

NO	**Tahun Periode Pilkada Jateng**	**Jumlah Dalam Presentase**
1	2005-2008	69 %
2	2010-2013	67 %
3	2015-2018	65,21 %

Sumber : KPU JATENG. Senin, 21 Desember 2015

Melihat data dari tabel diatas, rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada Jateng memang terus menurun dari periode satu ke periode berikutnya. Hal ini menimbulkan kecemasan KPU Provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan kembali

menurunya jumlah partisipasi pemilih pada pilgub 2018 nanti. Belajar dari pengalaman melaksanakan program informasi dan pendidikan pemilih dalam pemilu 2004, 2008 dan 2009 serta memahami rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang politik, maka KPU Provinsi Jawa Tengah mengupayakan langkah-langkah terobosan agar pemilih mempunyai bekal yang cukup untuk dapat menggunakan hak suarannya dengan cerdas,cermat dan tepat. Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 27 Juni 2018. KPU Provinsi Jawa Tengah memulai persiapan secara efektif sejak sepuluh bulan sebelum hari-H. "KPU sudah menetapkan tanggal pelaksanaan Pilkada, yakni Rabu Pon, 27 Juni 2018," kata Ketua KPU Jawa Tengah. Joko Purnomo. (Senin, 24 April 2017.TEMPO.CO, Semarang).

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada tahun depan diperkirakan akan meningkat sejumlah 28 juta jiwa pemilih dari yang sebelumnya 27 juta jiwa pada pilgub Jateng 2013. Dari jumlah tersebut, Komisi pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai kisaran 78 persen yang akan melebihi Target Nasional Pilgub 2018 sebesar 77,5 %. Hal ini Humas KPU Jateng sangat berperan penting dalam mensukseskan Pilgub dengan berbagai macam strategi yang nantinya akan diterapkan. Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya dengan Pilgub Jateng 2018 bertugas untuk menyiapkan strategi sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat Jawa Tengah agar menguasai proses dan mekanisme Pilgub.

Pada dasarnya strategi humas adalah alternative optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan *Public Relations* dalam kerangka suatu rencana

Public Relations, yang dibentuk melalui dua macam komponen yang saling erat, yakni : komponen sasaran segmen yang digarap) dan komponen sarana (paduan sarana untuk menggarap suatu sasaran) **(Ruslan, 2011:115-116)**

Sosialisasi merupakan kegiatan Humas KPU Provinsi JawaTengah karena salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilgub dapat dilihat dari efektif tidaknya langkah sosialisasi yang akan dilakukan Humas KPU terhadap masyarakat Jawa Tengah. Proses sosialisasi yang dilakukan KPU Jateng dapat berjalan lancar dengan menetapkan strategi sebagai prosedur pelaksanaan melalui tahap yang jelas dan terinci agar hasilnya mendapat respon postif dari masyarakat. Maka sosialisasi yang dilakukan oleh Humas bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (*target audience*) untuk merebut perhatian **(Ruslan, 2002: 60).**

Dengan harapan setiap pemilih dapat mengetahui dengan jelas semua informasi yang menyangkut pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2018, sehingga nantinya pemilih dapat turut serta berpartisipasi memberikan hak suaranya ke TPS.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan mesin demokrasi melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, secara spesifik KPU Provinsi Jawa tengah memiliki kewajiban menyelenggarakan dan memberikan informasi tentang Pilkada ke semua masyarakat Jawa tengah. Dengan begitu diharapkan semua lapisan masyarakat Jawa Tengah memahami betul tentang pentingnya

penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Namun fakta yang terjadi banyak warga Jawa Tengah tidak mempedulikan adanya pemilihan umum di Jawa Tengah, karena lebih mementingkan urusannya sendiri dengan beralasan merantau diluar pulau Jawa Tengah, Faktor ekonomi yang lemah bahkan merasa tidak berpengaruh dalam dirinya jika memberikan hak suaranya pada saat pemilihan berlangsung. Oleh sebab itu, momentum Pilgub juga membutuhkan sebuah keterlibatan masyarakat Jawa Tengah secara maksimal. Karena tanpa adanya keterlibatan masyarakat, maka pemilihan kepala daerah akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pilkada harus ditingkatkan.

Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 Humas KPU Provinsi Jawa Tengah menyiapkan strategi sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasai pemilih pada Pilgub Jateng 2018 dimaksudkan agar seluruh masyarakat yang merantau dapat memberikan hak suaranya, sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah mengenai bagaimanakah Strategi Sosialisasi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada PILGUB Jateng 2018.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi sosialisasi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub Jateng 2018.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu kehumasan di pemerintah, khusunya mengenai strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub Jateng 2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk dijadikan bahan analisis strategi sosialisasi seperti apa yang harus dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah supaya partisipasi pemilih dapat meningkat pada Pilgub Jateng 2018 serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

1.5 Kajian Teori

Public Relations atau Humas merupakan bagian penting dalam suatu organisasi untuk kegiatan komunikasi, dengan kata lain humas merupakan penghubung antara organisasi dengan khalayaknya. Humas membantu manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik.

Menurut Scott M. Cutlip Allen H Centre dalam bukunya **Ruslan(2008:25)** mengungkapkan bahwa Public Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara merencanakan suatu

program kegiatan dan komuniksi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya .

Sedangkan menurut **Frank Jefkins (2003:9-10)** *Public Relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayak dalam rangka mencapai tujuan – tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian.

Secara sederhana Humas merupakan keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Jadi Humas adalah suatu rangkaian kampanye atau program terpadu dan semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur **(Anggoro, 2002:1-2)**

Menurut Bernany, dalam bukunya **Soemirat & Ardianto (2001:1)** terdapat 3 fungsi utama Humas , yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya

Semua kegiatan *public relations* diperlukan strategi yang tepat agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Strategi digunakan sebagai pedoman dalam menentukan langkah – langkah yang diambil dalam merencanakan suatu kegiatan.

Menurut J.L Thompson dalam **Oliver (2001:2)** mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir ; hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.

Strategi adalah perencanaan (*Planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut , strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja , melainkan harus mampu menunjukan bagaimana taktik operasional. **(Effendy , 2003 : 32)**

Menurut **Gregory (2004:98)** strategi adalah pendekatan keseluruhan untuk suatu program atau kampanye. Selain itu , strategi adalah pengkoordinasian yang menjadi panutan , ide utama , dan pemikiran dibalik taktis.

Sedangkan Stephen Robbine dalam **Morrisan (2008:152)** panjang dan memutuskan arah tindakan serta mendapatkan sumber – sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Humas banyak mempunyai kegiatan – kegiatan agar strategi programmnya tercapai dengan baik , salah satunya dengan kegiatan sosialisasi. Humas dalam melakukan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (*target audience*) untuk merebut perhatian serta menimbulkan persepsi dan opini yang positif **(Ruslan, 2007 : 60).**

Menurut Seodjono Dirdjosoewiryo dalam **Abdulsyani (2002 : 67)**, Sosialisasi mengandung :

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar , yaitu suatu proses akomodasi dimana individu menahan implus – implus dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan – kebiasaan , sikap , ide – ide , pola – pola nilai , dan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup.
3. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan dalam suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Hal ini seseorang PR harus mempertimbangkan strategi yang digunakan dalam berkomunikasi dengan khalayaknya , agar apa yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh khalayaknya. Dalam merencanakan suatu strategi , seorang humas harus menggunakan teori **Cutlip (2006 : 320)** *Public Relations* melalui proses empat tahapan atau langkah – langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan strategi humas seperti :

1. *Fact Finding (*mencari fakta)

   Langkah pertama menyakup penyelidikan dan pengamatan opini dan sikap perilaku serta mengumpulkan fakta/data yang ada sebelum melakukan tindakan.

2. *Planning and Programming* (Perencanaan dan Pemogramman)

Informasi yang dikumpulkan pada tahap pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran.

3. *Taking actions and Communication* (mengambil tindakan dan komunikasi)

   Langkah ketiga adalah mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan spesifik.

4. *Evaluation* (evaluasi)

   Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi dan hasil dari program.

Dengan adanya strategi sosialisasi maka publik dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan atau program yang akan diadakan dengan tujuan agar masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut. Strategi tersebut harus benar – benar dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah melalui bagian humas agar mampu meningkatkan partisipasi pemilih Pilgub Jateng 2018.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

1.6.1 Definisi Konseptual

Strategi sosialisasi merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan , strategi komunikasi

harus mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan , dalam arti pendekatan bisa sewaktu – waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Sosialisasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dengan melakukan kegiatan – kegiatan untuk memberikan pengetahuan dengan suatu tujuan , bersifat mempengaruhi khalayak untuk mau mengetahui bahkan mau untuk mengikuti apa yang telah disampakan. **(Muslimin, 2004 : 41)**

Strategi Humas KPU Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan mensosialisasikan pelaksanaan komunikasi dua arah dan manajemen komunikasi yang terarah dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakt tentang pentingnya memberikan hak suaranya pada pelaksaan Pilgub Jateng 2018 agar partisipasi pemilih Pilgub Jateng yang akan datang bertambah serta dapat terlaksana dengan baik.

1.6.2 Definisi Operasional

Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan strategi sosialisasi Humas KPU Jateng. Dalam pelaksanaan sosialisasi ada empat proses yang dilakukan seorang Humas , yaitu menurut **Cutlip (2006 : 320) :**

1. Fact Finding (Mencari fakta)

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan beberapa informasi tentang pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pelaksanaan Pilgub. Setelah mendapatkan data maka dapat menjadi acuan untuk melaksanakan ke tahap yang berikutnya.

2. Planning and Programming (Perencanaan dan Pemogramman)

a. Melalui kerjasama dengan organisasi ke masyarakt (sosialisasi)

b. Melalui iklan dan penelitian (media relations)

c. Melalui komunikasi langsung

1. Seminar
2. Diskusi
3. Rapat kerja
4. Ceramah

3. Taking Actions And Communication (Mengambil tindakan dan mengkomunikasikan)

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan rencana , ini setelah proses perumusan strategi disetujui dan telah mantap untuk melaksanakan.

4. Evaluation (evaluasi)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah proses evaluasi kepada hasil – hasil yang telah dicapai dari program kerja Humas. Apakah program tersebut berhasil tanpa hambatan? Bagaimana respon masyarakat?

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif . Penelitian ini di maksudkan untuk mengumpulkan informasi seluas-luasnya terhadap obyek penelitian, mengumpulkan informasi mengenai suatu tema, gejala atau keadaan yang ada. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu namun lebih menggambarkan tentang suatu keadaan yang sebenarnya (**Mukthtar dan Erna Widodo, 2000:82).**

1.7.2 Sumber Informasi

Dalam penelitian ini , sumber informasi yang dipilih yaitu :

1. Kasubag Hukum dan Humas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

1.7.3 Jenis dan Sumber data

1. Data Primer

Data – data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara melalui interview guide dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data yang digunakan sebagai pendukung atau tambahan yang diperoleh dari beberapa sumber data antara lain data kepustakaan , internet , surat kabar dan buku referensi.

1.7.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data

a. Alat

Dalam mengumpulkan informasi untuk data penelitian menggunakan interview guide (panduan untuk wawancara) dalam mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari narasumber. Jawaban narasumber dicatat atau direkam menggunakan alat perekam.

b. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan cara mewawancarai langsung narasumber secara mendalam dan detail tentang permasalahan yang diteliti. Narasumber menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang dibicarakan, lalu penulis mencatat keterangan dari narasumber.

1.7.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dan keterangan dikumpulkan secara lengkap , kemudian data dan keterangan dianalisis dan diolah sesuai teori – teori yang mendukung. Dalam pengolahan data ini , data dideskripsikan dalam bentuk narasi yang didasarkan pada teori – teri yang sudah ada. sehingga berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan peneliti.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif , yaitu mendeskripsikan data – data yang terkumpul menggambarkan secara detail agar mencapai gambaran yang akurat dan sistematis.